KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 856 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN JASA AKSES INTERNET
(*INTERNET SERVICE PROVIDER*)
PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA telah memperoleh Izin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 878 Tahun 2015 tanggal 20 November 2015;

b. bahwa PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA telah memperoleh Perpanjangan Izin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 239 Tahun 2016 tanggal 14 November 2016;

c. bahwa PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA telah mendapatkan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) Nomor : 357/M.KOMINFO/PI.02.05/3/2017 tanggal 30 Maret 2017 untuk lokasi PoP di Kota Palu, Sulawesi Tengah;

d. bahwa PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara jasa akses internet (*Internet Service Provider*) sesuai peraturan perundang-undangan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2120 Tahun 2016 tentang Pemberian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika dalam rangka Pelayanan Prima di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN JASA AKSES INTERNET (*INTERNET SERVICE PROVIDER*) PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) kepada :

Nama Perusahaan : PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA
NPWP : 02.110.022.7-005.000
Alamat : Jl. Jengki Raya No.43C
Kec. Makassar
Jakarta Timur

Yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dengan anggaran dasar sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Nomor 1 tanggal 10 Desember 2001 dari Notaris H. Djoko Oetoro, S.H., MM, di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-16055 HT.01.01.TH.2003 tanggal 11 Juli 2003 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan akta Notaris Nomor 20 tanggal 16 September 2015 dari Notaris H. Jhonni M.Sianturi, S.H., di Jakarta yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03.0965363 Tahun 2015 tanggal 17 September 2015, yang selanjutnya disebut sebagai "Pemegang Izin".

KEDUA : Dalam menyelenggarakan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) Pemegang Izin wajib :

a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) berlaku sampai jangka waktu yang tidak terbatas, sepanjang Pemegang Izin mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) ini dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi secara menyeluruh setiap 5 (lima) tahun.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7-4-2017

a.n. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,
u.b.
KEPALA SUBDIREKTORAT JASA TELEKOMUNIKASI,

FALATEHAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Komunikasi dan Informatika (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (sebagai laporan);
4. Direktur Telekomunikasi (sebagai laporan).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 856 TAHUN 2017
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN JASA AKSES INTERNET
(*INTERNET SERVICE PROVIDER*)
PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

KETENTUAN PENYELENGGARAAN JASA AKSES INTERNET (*INTERNET SERVICE PROVIDER*) PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

1 UMUM

Pengertian

Seluruh pengertian telekomunikasi yang tercantum dalam Ketentuan ini adalah sama dengan pengertian telekomunikasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, beserta peraturan pelaksanaannya.

2 HAK PEMEGANG IZIN

2.1 Pemegang Izin mempunyai hak untuk menyelenggarakan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*).

2.2 Dalam menyelenggarakan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) Pemegang Izin berhak:

2.2.1 menerima pembayaran dari pengguna Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) atas penggunaan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) yang disediakannya;

2.2.2 memilih dan menggunakan teknologi layanan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) sepanjang memenuhi standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.2.3 mendapatkan Surat Keterangan Laik Operasi untuk setiap penambahan kapasitas dan/atau perluasan lokasi atau relokasi sarana dan prasarana penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) yang mengalami perubahan teknologi dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Pemegang Izin mendapat jaminan atas kerahasiaan data/informasi yang disampaikan dan sepanjang dinyatakan rahasia oleh Pemegang Izin.

3 KEWAJIBAN DAN SANKSI

3.1 Kewajiban Pengembangan Wilayah Layanan

3.1.1 Kondisi Eksisting

Tahun	Lokasi PoP (*Point of Presence*) (Kab/Kota)	Jumlah PoP (*Point of Presence*)	Cakupan Wilayah Layanan (Kab/Kota)	Minimal Kapasitas (*Bandwitdh*)
Eksisting s/d Maret 2017	Kota Palu	1	Kota Palu	10 Mbps
Total	TOTAL	1	-	10 Mbps

3.1.2 Pengembangan Wilayah Layanan

Tahun *)**)***)	Lokasi PoP (*Point of Presence*) (Kab/Kota)	Jumlah PoP (*Point of Presence*)	Cakupan Wilayah Layanan (Kab/Kota)	Minimal Kapasitas (*Bandwitdh*)
Tahun I	Kota Palu	1	Kota Palu	5 Mbps
Tahun II	Kota Palu	1	Kota Palu	5 Mbps
Tahun III	Kota Palu	1	Kota Palu	5 Mbps
Tahun IV	Kota Palu	1	Kota Palu	5 Mbps
Tahun V	Kota Palu	1	Kota Palu	5 Mbps
Total		5	----	25 Mbps

*) Periode tahun I terhitung sejak ditetapkannya izin penyelenggaraan sampai dengan akhir tahun buku;

**) Dalam hal izin penyelenggaraan ditetapkan setelah tanggal 30 Juni, maka kewajiban pembangunan tahun I terhitung sejak tanggal ditetapkannya izin penyelenggaraan sampai dengan akhir tahun buku berikutnya;

***) Periode tahun II dan seterusnya terhitung sesuai tahun buku (1 Januari – 31 Desember).

3.1.3 Pemegang izin wajib melaporkan hasil pengembangan wilayah layanan sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.2;

3.1.4 Dalam hal Pemegang Izin bermaksud merubah pengembangan wilayah layanan sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.2 wajib mendapat persetujuan dari Direktur Telekomunikasi sebelum dilaksanakannya pengembangan wilayah layanan tersebut;

3.1.5 Dalam hal Pemegang Izin bermaksud merubah pengembangan wilayah layanan sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.4, Pemegang Izin dapat mengajukan usulan perubahan pengembangan wilayah layanan paling banyak 2 (dua) kali setiap periode pengembangan wilayah layanan lima tahun sepanjang tidak mengurangi jumlah total komitmen pengembangan dalam 5 (lima) tahun;

3.1.6 Perubahan pengembangan wilayah layanan sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.4. tidak boleh dlakukan pada tahun pertama dan hanya dapat dilakukan untuk tahun berikutnya, serta usulan perubahannya harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masuk periode pengembangan tahun berikutnya;

3.1.7 Dalam hal terjadi perubahan dan/atau penambahan pengembangan wilayah layanan sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.2, Pemegang Izin penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) wajib melakukan penyesuaian Izin penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*).

3.2 Sanksi Kewajiban Pengembangan Wilayah Layanan

3.2.1 Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1, diberikan peringatan tertulis kepada Pemegang Izin penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;

3.2.2 Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.1 tidak diindahkan, Pemegang Izin penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) dikenakan sanksi denda yang besarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

3.2.3 Apabila sanksi denda sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.2 tidak dilaksanakan oleh Pemegang Izin penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*), dapat dilakukan pencabutan Izin.

3.3 Kewajiban Kinerja Operasi

3.3.1 Pemegang Izin penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) wajib menjamin kinerja operasi sekurang-kurangnya sebagai berikut :

3.3.1.1 memiliki *Point of Presence* (PoP) berikut sistem monitoringnya;

3.3.1.2 melayani operasi layanan selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

3.3.2 Pemegang Izin wajib menerapkan kualitas pelayanan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3.4 Sanksi Kewajiban Kinerja Operasi

3.4.1 Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3, diberikan peringatan tertulis kepada Pemegang Izin sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;

3.4.2 Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.1 tidak diindahkan, Pemegang Izin dikenakan sanksi denda yang besarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

3.4.3 Apabila sanksi denda sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.2 tidak dilaksanakan oleh Pemegang Izin, dapat dilakukan pencabutan Izin.

3.5 Kewajiban Koneksi dari dan ke Jaringan Internet Internasional

Koneksi dari dan ke jaringan internet internasional wajib disalurkan melalui penyelenggara Jasa Interkoneksi Internet (*Network Access Point/NAP*).

3.6 Sanksi Kewajiban Koneksi dari dan ke Jaringan Internet Internasional

3.6.1 Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.5, diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;

3.6.2 Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 3.6.1 tidak diindahkan, dilakukan pencabutan Izin.

3.7 Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi *(Universal Service Obligation)*

Pemegang Izin wajib membayar Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi *(Universal Service Obligation)* yang besaran dan tata cara pembayarannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3.8 Sanksi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi *(Universal Service Obligation)*

Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.7, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3.9 Kewajiban Persyaratan Teknis

3.9.1 Dalam membangun sarana dan prasarana Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*), Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan yang tercantum dalam rencana dasar teknis nasional yang berlaku;

3.9.2 Pemegang Izin wajib menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat perangkat dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan berlabel;

3.9.3 Pemegang Izin wajib menggunakan produksi dalam negeri sepanjang perangkat telekomunikasi yang akan digunakan tersedia.

3.10 Sanksi Kewajiban Persyaratan Teknis

Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.9, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.11 Kewajiban Pengamanan Jaringan

3.11.1 Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan yang terkait dengan usaha-usaha untuk menjaga keamanan internet, termasuk penyamaan *setting* waktu (*clock synchronizer*), menjaga gangguan *hacking*, *spamming*, pornografi;

3.11.2 Pemegang Izin wajib menyampaikan dan/atau meneruskan *log file* akses (trafik) internet kepada sistem penyimpanan yang disediakan oleh Pemerintah untuk keperluan keamanan jaringan internet.

3.12 Sanksi Kewajiban Pengamanan Jaringan

3.12.1 Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.11 diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;

3.12.2 Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 3.12.1 tidak diindahkan, dilakukan pencabutan Izin.

3.13 Kewajiban Terhadap Pengguna Jasa

3.13.1 Pemegang Izin wajib memberikan dan menjaga kelangsungan layanan jasanya kepada pengguna jasa secara benar dan tidak diskriminatif;

3.13.2 Pemegang Izin wajib mengoperasikan *Point of Presence (PoP)* untuk operasi layanannya selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari;

3.13.3 Pemegang Izin wajib menyampaikan informasi mengenai jenis layanan dan tarif layanan kepada pengguna jasa;

3.13.4 Dalam hal Pemegang Izin bermaksud menghentikan layanannya, Pemegang Izin wajib mendapat persetujuan dari Direktur Telekomunikasi dan memberitahukan/mensosialisasikan kepada pengguna jasa dalam waktu sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum layanan dihentikan;

3.13.5 Dalam hal terjadi penghentian layanan sebagaimana dimaksud pada butir 3.13.4, Pemegang Izin wajib menyalurkan layanannya kepada penyelenggara Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) lain sesuai dengan area layanannya sepanjang layanan tersedia dan memungkinkan.

3.14 Sanksi Kewajiban Terhadap Pengguna Jasa

3.14.1 Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.13, diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;

3.14.2 Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 3.14.1 tidak diindahkan, dilakukan pencabutan Izin.

3.15 Kewajiban Pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi

Pemegang Izin wajib membayar BHP Telekomunikasi yang besaran dan tata cara pembayarannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3.16 Sanksi Kewajiban Pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi

Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.15 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3.17 Kewajiban Uji Laik Operasi

Pemegang Izin wajib mengajukan permohonan Uji Laik Operasi dan memiliki Surat Keterangan Laik Operasi atas setiap penambahan kapasitas dan perluasan lokasi atau relokasi sarana dan prasarana penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) yang mengalami perubahan teknologi dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3.18 Sanksi Kewajiban Uji Laik Operasi

3.18.1 Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.17, diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;

3.18.2 Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 3.18.1 tidak diindahkan, dilakukan pencabutan Izin.

3.19 Kewajiban Memberikan Ganti Rugi Kepada Pengguna Jasa

3.19.1 Pemegang Izin wajib memberikan ganti rugi kepada pengguna Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) yang dirugikan dalam hal pelayanan yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak layanan, kecuali Pemegang Izin dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Pemegang Izin;

3.19.2 Kerugian sebagaimana dimaksud pada butir 3.19.1 terbatas kepada kerugian langsung yang diderita pemakai jasa atas kesalahan dan/atau kelalaian Pemegang Izin.

3.20 Sanksi Kewajiban Memberikan Ganti Rugi Kepada Pengguna Jasa

3.20.1 Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.19, diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;

3.20.2 Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 3.20.1 tidak diindahkan, dilakukan pencabutan Izin.

3.21 Kewajiban Pelaporan

3.21.1 Pemegang Izin wajib menyampaikan laporan berkala sekurang-kurangnya mencakup :

3.21.1.1 pengembangan wilayah layanan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.2;
3.21.1.2 kinerja operasi sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3;
3.21.1.3 data jumlah pelanggan;
3.21.1.4 segmentasi pengguna;
3.21.1.5 kualitas layanan;
3.21.1.6 grafik MRTG;
3.21.1.7 pendapatan kotor (*gross revenue*);
3.21.1.8 pembayaran BHP Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi *(Universal Service Obligation)*.

3.21.2 Laporan sebagaimana dimaksud pada butir 3.21.1 disampaikan setiap tahun dengan disertai rincian data dan informasi bulanan;

3.21.3 Dalam rangka pembinaan, Pemegang Izin wajib menyampaikan laporan, informasi, atau data yang diperlukan apabila diminta.

3.22 Sanksi Kewajiban Pelaporan

3.22.1 Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.21, diberikan peringatan tertulis kepada Pemegang Izin sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;

3.22.2 Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 3.22.1 tidak diindahkan, Pemegang Izin dikenakan sanksi denda yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3.22.3 Apabila sanksi denda sebagaimana dimaksud pada butir 3.22.2 tidak dilaksanakan oleh Pemegang Izin, dapat dilakukan pencabutan Izin.

4 PELAKSANAAN SANKSI

4.1 Denda sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2, 3.4, dan 3.22 disetorkan langsung ke kas negara melalui rekening Bendahara Penerima di Bank Pemerintah yang ditunjuk;

4.2 Dalam hal denda sebagaimana dimaksud pada butir 4.1 tidak diindahkan, diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;

4.3 Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 4.2 tidak diindahkan, dilakukan pencabutan Izin;

4.4 Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2, butir 3.4, butir 3.6, butir 3.12, butir 3.14, butir 3.18, butir 3.20, butir 3.22 dan butir 4.3 tidak membatalkan kewajiban pembayaran BHP Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi *(Universal Service Obligation)* beserta denda yang merupakan piutang negara.

5 LAIN-LAIN

5.1 Kesinambungan Pelayanan Atas Pencabutan Izin

Dalam hal terjadi pencabutan Izin, Pemegang Izin wajib menyalurkan kepentingan pemakai jasa ke penyelenggara Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) lain sesuai dengan area layanannya sepanjang layanan tersedia dan memungkinkan.

5.2 Perubahan Nama, Alamat, dan Kepemilikan Perusahaan

5.2.1 Pemegang Izin wajib melaporkan kepada Direktur Telekomunikasi setiap perubahan nama perusahaan dan/atau alamat perusahaan.

5.2.2 Dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan dan/atau alamat perusahaan, Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA wajib dilakukan penyesuaian.

5.2.3 Kepemilikan saham perusahaan :

5.2.3.1 Pemegang Izin dilarang merubah susunan kepemilikan saham perusahaan, kecuali jika telah memenuhi kewajiban pembangunan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total kewajiban 5 (lima) tahun;

5.2.3.2 Dalam hal akan dilakukan perubahan kepemilikan saham kepada pemegang saham Indonesia dan/atau asing yang bukan melalui pasar modal, Pemegang Izin wajib menyampaikan rencana perubahan kepemilikan saham kepada Direktur Telekomunikasi untuk mendapatkan persetujuan sebelum melakukan perubahan kepemilikan saham;

5.2.3.3 Larangan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.3.1 tidak berlaku bagi perusahaan terbuka (publik) yang transaksi perubahan sahamnya dilakukan melalui bursa saham dalam negeri;

5.2.3.4 Saham PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA dapat dimiliki oleh pemegang saham asing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

5.3 Keadaan Diluar Kemampuan

5.3.1 Pemegang Izin dapat mengajukan permohonan penangguhan kepada Direktur Telekomunikasi atas pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.2 yang disebabkan oleh:

5.3.1.1 keadaan kahar (*Force Majeure*), yaitu dapat berupa bencana alam, perang, huru-hara, dan pemberontakan;

5.3.1.2 kebijakan Pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter, serta kebijakan lainnya dari Pemerintah baik pusat maupun daerah yang sangat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Pemegang Izin.

5.3.2 Pemegang Izin wajib memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Telekomunikasi paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada butir 5.3.1 dengan melampirkan bukti-bukti yang sah dari instansi yang berwenang.

5.3.3 Atas permohonan Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada butir 5.3.1 dan setelah dilakukan penelitian dan evaluasi, Direktur Telekomunikasi dapat memberikan persetujuan atau penundaan penangguhan atas pelaksanaan kewajiban paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya permohonan.

a.n. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,
u.b.
KEPALA SUBDIREKTORAT JASA TELEKOMUNIKASI,

FALATEHAN